

	News Title : Jalin Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Bappebti Komit Tingkatkan Transparansi	
	Media Name : Kliksemarang.com	Journalist : Arby Yan
	Publish Date : 23 December 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Kerja Sama Dukcapil

Nasional

Jalin Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Bappebti Komit Tingkatkan Transparansi

Arby Yan - Jumat, 23 Desember 2022 | 08:26 WIB



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan usai penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis 22 Desember 2022. (ANTARA/HO Kementerian Perdagangan)

KLIKSEMARANG.COM – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Kementerian Perdagangan (**Kemendag**) memerlukan dukungan **data kependudukan** para pelaku perdagangan berjangka dan komoditi.

Untuk itu, **Bappebti** menjalin **kerja sama** dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (**Kemendagri**).

Plt Kepala **Bappebti Kemendag** Didid Noordiatmoko mengatakan, dukungan **data kependudukan** diperlukan untuk mendukung peningkatan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **Bappebti**.

Baca Juga: Kecelakaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tewaskan 2 WNA China, Simak Respons Ketua MPR RI Bansoet

"Penandatanganan (**kerja sama**) ini adalah wujud harmonisasi untuk mendukung transparansi atas implementasi ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas dalam rangka pemanfaatan **data kependudukan**," kata Didid, dilansir Kliksemarang.com dari Antaranews.com berdasarkan siaran pers, Jumat 23 Desember 2022.

Menurut Didid, hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Penandatanganan perjanjian **kerja sama** dilakukan Didid Noordiatmoko dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.

Perjanjian **kerja sama** itu terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan, **data kependudukan**, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam lingkup tugas **Bappebti**.

Baca Juga: [Jalan Tol Semarang-Demak Mulai Dibuka, Masih Gratis pada 22 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023](#)

Didid menambahkan, perjanjian **kerja sama** mengatur lebih khusus layanan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan **Bappebti** serta dalam proses penerimaan nasabah dan/atau pelanggan oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan **Bappebti**. Hal ini bertujuan mencegah penyimpangan, seperti pencucian uang.

Didid menyampaikan, tantangan dalam era globalisasi dan industri digital ke depan menempatkan basis teknologi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan setiap fungsi pengawasan, baik yang bersifat operasional maupun teknis.

Karena itu, **Bappebti** memandang perlu memiliki PKS langsung dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagi setiap pelaku usaha pun wajib memiliki dokumen perjanjian **kerja sama** dengan Dirjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan **data kependudukan** dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Baca Juga: [Undip Luncurkan Kapal Bertenaga Surya DIPONEGORO 1.0, Persiapan Ikuti Kompetisi Internasional](#)

Hal itu diatur dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan bahwa pengguna pusat dapat mengajukan pemberian hak akses yang tahapannya telah diatur dalam Pasal 7 Permendagri No.102 Tahun 2019.

Tahapan tersebut salah satunya memiliki nota kesepahaman dan perjanjian **kerja sama** dengan Dirjen Dukcapil.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 mempersyaratkan dokumen perizinan usaha sebelum badan hukum Indonesia dapat melakukan perjanjian **kerja sama** dengan Dirjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan **data kependudukan**.

“Diharapkan dengan perjanjian **kerja sama** ini, kependudukan dapat mendukung perkembangan layanan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas,” kata Didid.

Baca Juga: Puisi-Puisi Moderasi Beragama Akan Menggema di Kelenteng Hok Tik Bio Ambarawa

Selain itu, seluruh jajaran bursa berjangka, lembaga kliring, dan asosiasi yang hadir diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung implementasi **kerja sama** itu dan dapat menginformasikan kepada seluruh anggotanya.

Adapun Dirjen Dukcapil **Kemendagri** Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan apresiasi untuk penandatanganan PKS tersebut.

“Data kependudukan dapat digunakan untuk verifikasi. **Kemendagri** berkomitmen terus memperbaiki **data kependudukan** agar tetap jelas dan bersih,” ujar Zudan.***